



**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DALAM PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANYUWANGI  
PADA TAHUN 2011-2015**

*The Contribution of Tourism Sector to Labour  
Recruitment in Banyuwangi  
2011-2015*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Aulia Syafar**

**NIM 130910201031**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DALAM PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANYUWANGI  
PADA TAHUN 2011-2015**

*The Contribution of Tourism Sector to Labour  
Recruitment in Banyuwangi  
2011-2015*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Aulia Syafar

NIM 130910201031

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

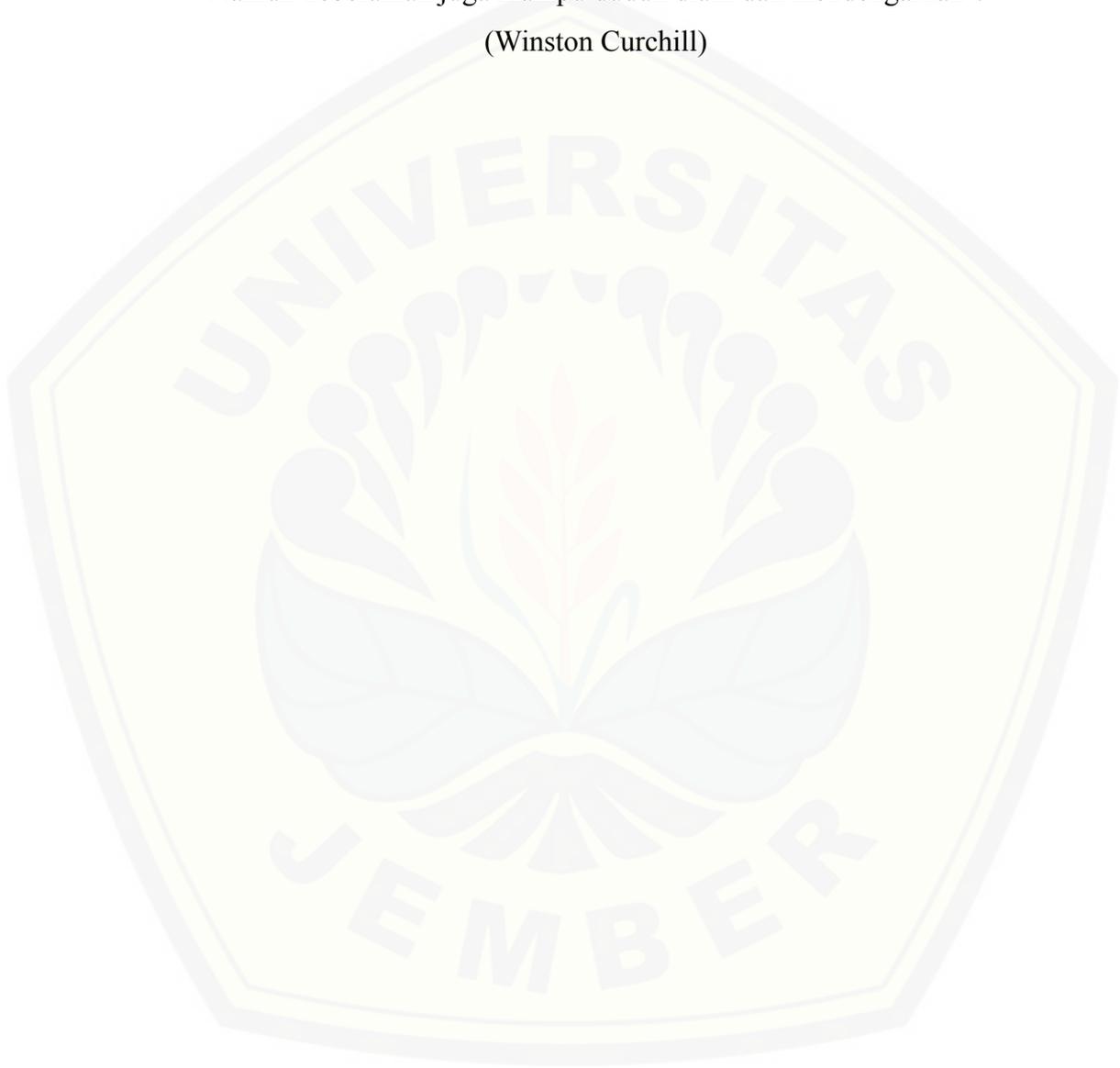
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ibunda Refila Aulina, S.Pd.I dan ayahanda Drs. Syakirin Jakfar yang telah memberikan kesejukan hati, kelapangan pikiran, motivasi yang tiada henti serta dukungan materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini. Menasehati disaat mengalami kesulitan seperti tetesan embun di gunung pasir yang panas. Terima kasih tiada henti kepada kedua orang tua, penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka berdua yang berjasa;
2. kakak-kakakku, Rima Refelina Syafar, S.Si dan Ridha Refelina Syafar, S.Psi yang telah mendoakan dan memberikan arahan kepada penulis;
3. R. Navali S., S.Ked, yang senantiasa sabar dan selalu memberikan semangat kepada penulis;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

"Keberanian adalah kemampuan untuk berdiri dan menyuarakan pendapat.  
Namun keberanian juga mampu duduk diam dan mendengarkan".

(Winston Churchill)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Syafar

NIM : 130910201031

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2018

Yang menyatakan,

Aulia Syafar

NIM. 130910201031

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DALAM PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANYUWANGI  
PADA TAHUN 2011-2015**

*The Contribution of Tourism Sector to Labour  
Recruitment in Banyuwangi  
2011-2015*

Oleh:

Aulia Syafar

130910201031

Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. Agus Suharsono, M.Si**

Pembimbing Anggota : **Drs. Supranoto, M.Si**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015" telah diuji dan disahkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 19 Februari 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris

Dr. Sutomo, M.Si

Drs. Agus Suharsono, M.Si

NIP. 196503211991031003

NIP. 196308141989031023

Anggota Tim Penguji,

1. Drs. Supranoto, M.Si ( )  
NIP. 196102131988021001
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, MAP ( )  
NIP. 197410072000121001
3. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ( )  
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015**; Aulia Syafar, 130910201031; 2018:86 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pengembangan Pariwisata merupakan salah satu upaya pengentasan pengangguran di suatu daerah. Era otonomi daerah, suatu daerah mempunyai peluang besar dalam mengurus keperluan dan mengatasi permasalahan pengangguran daerah melalui pengembangan pariwisata (tertuang dalam urusan konkuren Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Kabupaten Kabuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Banyuwangi mendapatkan sejumlah penghargaan sektor pariwisata salah satunya yaitu penghargaan dari badan urusan pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Madrid, Sepanyol pada 20 Januari 2016. Rentang waktu tahun 2011-2015, Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,51 persen.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi sektor pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penggalan data yang dilakukan dengan metode wawancara, serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pada penelitian ini menggunakan analisis proporsi serta analisis time series, selain itu penulis juga melakukan pengumpulan data primer di lapangan, dan melakukan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data.

Hasil dari perhitungan proporsi dapat digambarkan bahwa Kontribusi sektor pariwisata (perhotelan, restoran, perdagangan) dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015 dinilai cukup besar. Rata-rata kontribusi sektor pariwisata pertahun mencapai 23,26 persen dengan rata-rata peningkatan kontribusi pertahun sebesar 2,63 persen. Ditinjau berdasarkan jenis

kelamin, secara total dari tahun 2011-2015 jumlah tenaga kerja perempuan sektor pariwisata lebih besar dari tenaga kerja laki-laki yakni mencapai 539.350 orang, sedangkan laki-laki mencapai 415.710 orang. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pertahun, pertumbuhan tenaga kerja laki-laki lebih besar dari tenaga kerja perempuan yakni mencapai 10,20 persen, sedangkan perempuan mencapai 5,68 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan serta peluang yang sama untuk bekerja di sektor pariwisata. Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga kerja pariwisata (hotel dan restoran) masih didominasi oleh lulusan SLTA dengan persentase sebesar 82,65 persen. Melihat lebih lanjut, terkait pengkrekrutan pegawai, Lulusan SMK Perhotelan atau sekolah yang basicnya perhotelan lebih diutamakan dari lulusan lainnya. Sedangkan ditinjau berdasarkan usia, tenaga kerja pariwisata masih didominasi oleh kategori usia muda (18-30 tahun), dengan persentase sebesar 77,32 persen.

## PRAKATA

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis nikmat kesehatan dan kesempatan, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015" dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan berupa bimbingan, masukan, kritikan, serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai fasilitas yang memadai, sehingga tersedianya sumur ilmu untuk menimba sebanyak mungkin.
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Dr. Edy Wahyudi, M.M, dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Dr. Sutomo, M.Si yang telah memberikan arahan serta memberikan kemudahan secara prosedural sehingga terselesaikannya penulisan ini.
3. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan, arahan dan kepercayaan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Supranoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi, dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta memberikan motivasi penuh kepada penulis sehingga sifat futur dalam menuntut ilmu dapat dihindari.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf dan karyawan di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi negara.

6. Berbagai informan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
7. Ayahanda Drs. Syakirin Jakfar dan ibunda Refila Aulina S.Pd.I yang selalu memberikan motivasi dan kesejukan hati sehingga penulis termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik.
8. Rima Refelina Syafar, S.Si dan Ridha Refelina Syafar, S.Psi selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan keceriaan dan dorongan agar tetap sabar dalam menyusun tugas akhir.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan tahun 2013.
10. Teman-Teman Kos Budim yang seperantauan, dan sama-sama berjuang demi masa depan yang lebih baik.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Demikianlah ungkapan terima kasih yang tulus dari hati. Atas segala kesalahan ataupun ucapan yang kurang berkenan, penulis minta maaf yang setulus-tulusnya. Semoga penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun empiris.

Jember, November 2017

Aulia Syafar

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi .....	16
2.2 Perencanaan Pembangunan Era Otonomi .....	19
2.3 Pariwisata .....	23
2.4 Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja .....	27
2.5 Kontribusi Sektor Pariwisata .....	29
2.6 Penelitian Terdahulu .....	34
2.7 Kerangka Konseptual.....	35

<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	38
3.4 Data dan Sumber Data .....	39
3.5 Pengecekan Keabsahan Data .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6.1 Wawancara .....	42
3.6.2 Dokumentasi.....	43
3.7 Teknik Analisis Data .....	44
3.8 Teknik Penyajian Data .....	45
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1 Gambaran Kab. Banyuwangi .....	46
4.1.2 Disbudpar. Kab. Banyuwangi .....	51
4.2 Kebijakan Pariwisata Kab. Banyuwangi .....	57
4.3 Cerminan Kemajuan Pariwisata Banyuwangi .....	63
4.4 Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penyerapan Tenaga Kerja .....	66
4.4.1 Ditinjau berdasarkan jenis kelamin .....	68
4.4.2 Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan.....	70
4.4.3 Ditinjau berdasarkan usia .....	72
4.5 Pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan .....	93
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

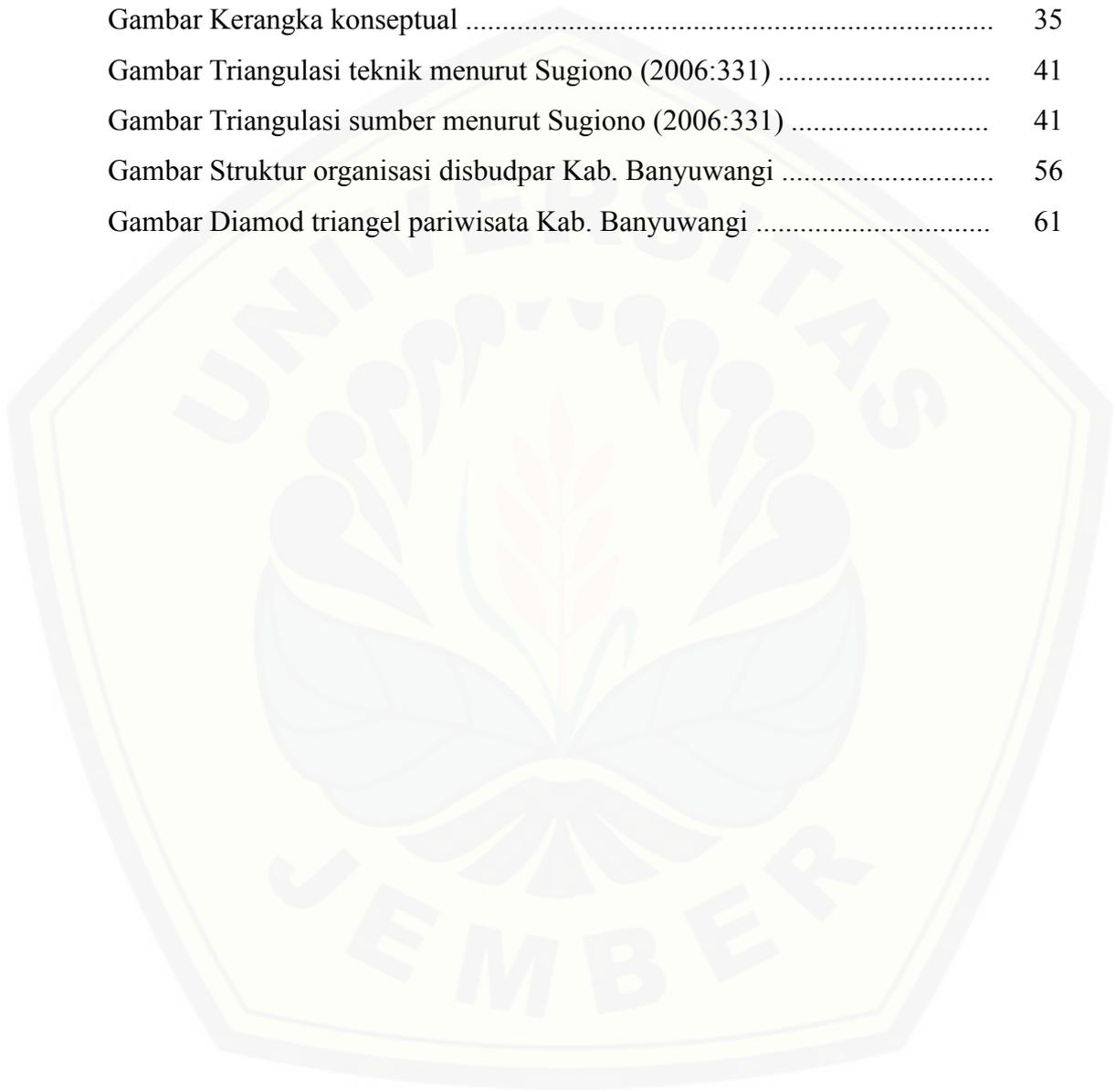
**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 TPT di Indonesia tahun 2011-2015 .....	2
Tabel 1.2 TPT di Jawa Timur tahun 2011-2015 .....	3
Tabel 1.3 Kunjungan wisman ke Indonesia dan penerimaan devisa tahun 2011-2015 .....	4
Tabel 1.4 Ranking devisa pariwisata terhadap sebelas ekspor barang terbesar tahun 2011 dan 2015 .....	5
Tabel 1.5 Perkembangan usaha akomodasi menurut klasifikasi akomodasi tahun 2011-2015 .....	7
Tabel 1.6 Pengunjung ODTW Kab. Jember dan Kab. Banyuwangi tahun 2011-2015 .....	9
Tabel 1.7 TPT menurut Kabupaten/Kota tahun 2011 dan 2015.....	11
Tabel 2.1 Urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	18
Tabel 2.2 Klasifikasi Lapangan Pekerjaan Utama menurut BPS .....	30
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut Usman dan Abdi (2012:8) .....	37
Tabel 4.1 Jumlah kecamatan, desa, kelurahan di Kab. Banyuwangi tahun 2014 .....	47
Tabel 4.2 Luas tanah berdasarkan struktur geologi Kab. Banyuwangi .....	49
Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Kab. Banyuwangi tahun 2015 .....	51
Tabel 4.4 Prioritas pembangunan daerah Ka. Banyuwangi tahun 2016-2021 .....	59
Tabel 4.5 Jumlah ODTW Kab. Banyuwangi tahun 2011-2017 .....	62
Tabel 4.6 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke ODTW (alam dan buatan)	

	Kab. Banyuwangi tahun 2011-2016 .....	63
Tabel 4.7	Penumpang melalui bandara, kereta api, Penyebrangan Gilimanuk dan Ketapang tahun 2011-2015 .....	64
Tabel 4.8	PDRB Kab. Banyuwangi atas dasar harga berlaku (juta rupiah) .....	66
Tabel 4.9	Statistik tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Banyuwangi .....	67
Tabel 4.10	Karakteristik tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Banyuwangi ditinjau berdasarkan jenis kelamin .....	68
Tabel 4.11	Karakteristik tenaga kerja perhotelan dan restoran di Kabupaten Banyuwangi ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan .....	70
Tabel 4.12	Karakteristik tenaga kerja perhotelan dan restoran di Kabupaten Banyuwangi ditinjau berdasarkan usia .....	72
Tabel 4.13	Penduduk NTT 15 ke atas yang menganggur berdasarkan pendidikan terakhir yang di tamatkan tahun 2011 dan 2012 .....	74

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar Kerangka konseptual .....	35
Gambar Triangulasi teknik menurut Sugiono (2006:331) .....	41
Gambar Triangulasi sumber menurut Sugiono (2006:331) .....	41
Gambar Struktur organisasi disbudpar Kab. Banyuwangi .....	56
Gambar Diamod triangel pariwisata Kab. Banyuwangi .....	61



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan kontribusi sektor pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015. Penulis mengambil masalah penelitian tentang kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015, karena penulis menilai masalah penelitian ini menarik untuk diteliti. Adapun hal-hal yang penulis anggap menarik antara lain karena:

1. pengangguran merupakan masalah yang masih sulit untuk diselesaikan, terutama di Indonesia sebagai negara dunia ke tiga;
2. menurut Organisasi Pariwisata dunia dalam Neparnas (2014), serta menurut Utama 2014, pengembangan pariwisata dapat berdampak baik dalam mengatasi pengangguran dan serapan tenaga kerja;
3. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah dengan sektor pariwisata maju pada rentang tahun 2011-2015, terbukti mendapatkan sejumlah prestasi atau penghargaan di sektor pariwisata pada rentang periode tersebut;
4. Pada rentang tahun 2011-2015, Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibanding Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo. Berikut akan penulis ulas secara rinci.

Penulis menilai permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang pelik. Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, terutama negara dunia ke tiga. Hal ini dikarenakan lapangan usaha tidak mampu menampung angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara atau daerah akan membebani negara atau daerah, karena semakin banyak masyarakat yang menganggur berakibat kurangnya daya beli masyarakat. Alhasil, negara atau daerah akan mengeluarkan biaya demi mengurangi beban masyarakat dengan mengeluarkan subsidi, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun subsidi yang bersifat konsumtif.

Permasalahan pengangguran di Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga merupakan permasalahan yang sulit untuk di atasi. Benar bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia masih berada di bawah angka 10 persen secara keseluruhan, akan tetapi tahun ke tahun dari 2011 sampai 2015 seolah sulit untuk di selesaikan dengan ditandai penurunan TPT yang relatif kecil. Berikut penulis sajikan tabel terkait TPT di Indonesia.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2015

Bulan	Tahun dalam persen (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Februari	6,96	6,37	5,88	5,70	5,81
Agustus	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18

Sumber: diolah berdasarkan data BPS Pusat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat adanya fluktuasi dari tahun ke tahun terkait TPT di Indonesia. Bulan februari 2011, TPT di indonesia mencapai 6,96 persen, dan naik pada bulan agustus mencapai 7,48 persen. Pada bulan februari 2012 sampai bulan februari 2013 terus mengalami penurunan dan kembali naik pada bulan agustus 2013. Kembali turun pada tahun 2014 mencapai 5,70 persen dan terus mengalami kenaikan hingga bulan agustus 2015. Data ini menggambarkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia masih berupaya mengatasi permasalahan pengangguran. Pada rentang waktu lima tahun ini, terlihat bahwa Pemerintah Indonesia hanya dapat menurunkan 0,78 persen TPT secara keseluruhan di Indonesia. Serupa yang terjadi di Jawa Timur. Data BPS memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 bulan februari, TPT di Jawa timur mencapai 4,24 persen dan naik pada bulan agustus mencapai 5,38 persen. Kembali mengalami fluktuasi hingga agustus 2015. Pada rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2015, Provinsi Jawa Timur hanya dapat menurunkan TPT sebesar 0,23 persen. Berikut penulis sajikan data dalam bentuk tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2015

Bulan	Tahun dalam persen (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Februari	4,24	4,16	3,97	4,02	4,31
Agustus	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47

Sumber: diolah berdasarkan data BPS Pusat

Data-data di atas, telah tergambar bahwa pemerintah perlu memperhatikan secara serius permasalahan pengangguran, mengingat pertumbuhan penduduk yang setiap tahun selalu meningkat. Hal ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah, lapangan pekerjaan yang semakin sedikit mengingat adanya arus globalisasi dan ekonomi masyarakat menjadi semakin terpuruk. Oleh karenanya, perlu solusi efektif dalam mengatasi permasalahan ini sehingga ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan maupun peluang untuk berusaha. Salah satu solusi yang hangat dibicarakan pada era globalisasi adalah melakukan pengembangan pariwisata.

Peningkatan jumlah destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata sebagai penggerak utama kemajuan sosial ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur. Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization/UNWTO*) dalam Nesparnas (2014) (neraca satelit pariwisata/Kementerian Pariwisata) memperkirakan, wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan kunjungan 3,3 persen per tahun. Wilayah Asia dan Pasifik diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 4,9 persen, bahkan di negara tertentu pertumbuhannya akan lebih tinggi. Angka perkiraan UNWTO ini tentu sangat menggiurkan bagi pelaku usaha pariwisata.

*Pertama*, pengembangan pariwisata menguntungkan terhadap penerimaan devisa. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dalam *Passenger Exit Survey* (2015), dari tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah wisatawan mancanegara

yang berkunjung ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan devisa negara pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Berikut disajikan data tentang kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa tahun 2011-2015.

Tabel 1.3 Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan penerimaan devisa tahun 2011-2015

Tahun	Wisatawan Mancanegara		Penerimaan Devisa	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta USD)	Pertumbuhan (%)
2011	7.649.731	9,24	8.554,39	12,51
2012	8.004.462	4,63	9.120,85	6,62
2013	8.802.129	9,42	10.054,15	10,23
2014	9.435.411	7,19	11.166,15	11,06
2015	10.406.759	10,29	12.225,89	9,49

Sumber: diolah dari data Kementerian Pariwisata dalam *Passenger Exit Survey* (2015)

Data di atas memperlihatkan bahwa, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2015 meningkat sebesar 10,29 persen yakni 10.406.759 (pengunjung) dibanding tahun 2014 sebanyak 9.435.411 (pengunjung). Melihat penerimaan devisa negara, pada tahun 2015 penerimaan devisa meningkat 9,49 persen yakni 12.225,89 juta USD dibanding tahun 2014 sebanyak 11.166,15 juta USD. Lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebanyak 2.757.028 pengunjung dan penerimaan devisa meningkat sebanyak 3.671,5 juta USD.

Sektor pariwisata pada era globalisasi memang menjadi alternatif bahkan pilihan utama penggerak ekonomi di suatu daerah atau di suatu negara. Pembangunan pariwisata di Indonesia menempatkan penerimaan devisa negara sektor pariwisata di urutan lima jika dibanding dengan penerimaan sebelas ekspor barang terbesar pada tahun 2011. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan penerimaan devisa pariwisata terbesar ke lima setelah penerimaan dari ekspor minyak dan gas bumi, batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet olahan. Pada tahun 2015 penerimaan devisa sektor pariwisata naik ke peringkat empat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, minyak kelapa sawit. Data tersebut menunjukkan

bahwa pembangunan pariwisata mempunyai prospek yang menjanjikan dalam menunjang kemajuan ekonomi suatu negara. Berikut disajikan data tentang ranking devisa pariwisata terhadap sebelas ekspor barang terbesar tahun 2015.

Tabel 1.4 Ranking devisa pariwisata terhadap sebelas ekspor barang terbesar tahun 2011 dan 2015

Ranking	Tahun 2011	
	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)
1	Minyak dan gas bumi	41.477,10
2	Batu bara	27.221,80
3	Minyak kelapa sawit	17.261,30
4	Karet olahan	14.258,20
5	Pariwisata	8.554,39
6	Pakaian jadi	7.801,50
7	Alat listrik	7.364,30
8	Tekstil	5.563,30
9	Makanan olahan	4.802,10
10	Bahan kimia	4.630,00
11	Kertas dan barang dari kertas	4.214,40
12	Kayu olahan	3.288,90

Ranking	Tahun 2015	
	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)
1	Minyak dan gas bumi	18.552,10
2	Batu bara	15.943,00
3	Minyak kelapa sawit	15.385,20
4	Pariwisata	12.225,89
5	Pakaian jadi	7.371,90
6	Makanan olahan	6.456,30
7	Karet olahan	5.842,00
8	Alat listrik	5.644,80
9	Tekstil	4.996,00
10	Kayu olahan	3.815,80
11	Kertas dan barang dari kertas	3.605,50
12	Bahan kimia	2.807,60

Sumber: diolah dari data Kementerian Pariwisata ([www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id))

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2015, minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit merupakan tiga ekspor barang dengan pemasukan terbesar bagi Indonesia dibanding ekspor barang lainnya. Pemasukan devisa sektor pariwisata di urutan empat pada tahun 2015, kemudian disusul oleh ekspor pakaian jadi, makanan olahan, karet olahan, alat listrik, tekstil, dan sebagainya. Walaupun masih di bawah minyak dan gas bumi,

batu bara, dan minyak kelapa sawit, sektor pariwisata mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dengan melihat pertumbuhan devisa pariwisata yang setiap tahun terus mengalami peningkatan.

*Kedua*, Pengembangan pariwisata akan mempercepat pembangunan fisik daerah. Peningkatan jumlah wisatawan akan memicu pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, seperti perbaikan jalan, penerangan, air bersih, dan sebagainya. Selain itu, pariwisata yang berkembang pesat akan memicu arus investasi, demikian itu pemerintah mempunyai momentum untuk melakukan sejumlah kerjasama dengan investor. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pengembang untuk melakukan perbaikan fasilitas, sehingga pemerintah dapat menghemat anggaran negara untuk dialihkan kepada masalah lain.

*Ketiga*, pengembangan sektor pariwisata berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Pendit dalam Utama (2014), pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi. Utama (2014:150) menjelaskan, “WTO mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap penyediaan lahan pekerjaan sebesar 7% secara internasional. Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industri pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar”. Menurut Mitchell dan Ashley dalam Utama (2014:151), “sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti. Indeks terbesar terjadi di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Philipines, Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93”.

Kontribusi sektor pariwisata dalam menyerap tenaga kerja dikarenakan pembangunan sektor pariwisata akan berimplikasi terhadap pembangunan subsektor pariwisata. Contohnya, pembangunan suatu destinasi wisata akan berdampak terhadap pembangunan akomodasi (hotel, penginapan), pembangunan transportasi, dan pertumbuhan usaha pariwisata lainnya. Melihat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dalam lima tahun terakhir, tentu dapat dilihat usaha akomodasi dari tahun ke tahun akan terus meningkat.

Data dari Kementerian Pariwisata memperlihatkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2014 hotel bintang dan akomodasi non bintang terus mengalami peningkatan. Peningkatan usaha akomodasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tentu akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Berikut disajikan data tentang perkembangan usaha akomodasi menurut klasifikasi akomodasi tahun 2011 sampai dengan 2014.

Tabel 1.5 Perkembangan usaha akomodasi menurut klasifikasi akomodasi tahun 2011-2014

Klasifikasi Akomodasi	2011	2012	2013	2014
Total	15.283	15.998	16.685	16.367
Hotel Bintang	1.489	1.623	1.778	1.996
- Bintang 5	129	138	155	160
- Bintang 4	252	297	335	376
- Bintang 3	457	509	554	668
- Bintang 2	290	333	374	437
- Bintang 1	361	346	360	355
Akomodasi non bintang	13.794	14.375	14.907	14.371
- Hotel melati	8.433	8.466	8.941	9.724
- Penginapan remaja	406	436	359	489
- Pondok wisata	2.374	3.310	3.199	2.800
- Akomodasi lainnya	2.581	2.163	2.408	1.358

Sumber: diolah dari data BPS dalam statistik akomodasi Kementerian Pariwisata

Tabel 1.5 di atas memperlihatkan bahwa jumlah usaha akomodasi dari tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Walaupun jumlah akomodasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 menurun sebanyak 318 akomodasi, akan tetapi secara total dari tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah akomodasi meningkat dari 15.283 (akomodasi) menjadi 16.367 (akomodasi). Peningkatan akomodasi tersebut membuka lapangan kerja bagi pencari kerja karena setiap barang atau jasa yang diproduksi oleh setiap akomodasi, membutuhkan tenaga kerja.

Secara regulasi, pemerintah daerah mempunyai peluang untuk memajukan pariwisata daerah. Pada era otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di antaranya aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Otonomi daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2011:76), “tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah”.

Strategi pembangunan pada dasarnya adalah cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Strategi yang baik dan tepat akan menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penetapan strategi yang tepat untuk suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi, potensi (sumberdaya yang tersedia) yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga pembangunan yang dihasilkan akan berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat. Pertimbangan terhadap kondisi umum dan potensi suatu daerah menjadikan proses pembangunan tersebut dapat berjalan lebih terarah dan efisien sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menitikberatkan pengembangan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menilai pariwisata yang maju, akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah, sehingga menempatkan sektor pariwisata pada prioritas unggulan. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, terlihat tujuan pengembangan pariwisata Banyuwangi yang tercantum pada pasal 3 yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;

5. melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jatidiri dan kesatuan bangsa;
10. mempererat persahabatan antar bangsa.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten banyuwangi bisa dibilang sangat pesat. Konsep *treangel diamond* dengan membagi wilayah pengembangan pariwisata menjadi tiga bagian serta mengadakan sejumlah festival atau atraksi wisata, mengantarkan Banyuwangi menjadi kota dengan sektor pariwisata yang maju. Kemajuan yang pesat terlihat dari jumlah wisata yang berkunjung ke banyuwangi. Destinasi pariwisata Banyuwangi selalu mengalami kenaikan yang signifikan, dibanding dengan Kabupaten Jember. Data terkait pengunjung ODTW (objek dan daya tarik wisata) menggambarkan, pengunjung objek dan daya tarik wisata Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi sama-sama mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Melihat pertumbuhan pengunjung dari tahun 2011 sampai dengan 2015, Kabupaten Banyuwangi lebih unggul dibanding Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Banyuwangi mempunyai keistimewaan terkait pariwisata. Berikut ini disajikan jumlah kunjungan pariwisata periode Tahun 2011-2015.

Tabel 1.6 Pengunjung objek dan daya tarik wisata Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Kabupaten Jember	Kabupaten Banyuwangi
	Pengunjung ODTW (orang)	Pengunjung ODTW (orang)
2011	463.751	802.478
2012	529.995	866.333
2013	587.620	1.068.414
2014	644.913	1.495.629
2015	750.461	1.772.827

Sumber: diolah dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Jember dan Kab. Banyuwangi

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pengunjung ODTW kabupaten jember pada tahun 2011 sebanyak 463.751 orang, dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 750.461 orang. Pengunjung ODTW Kabupaten banyuwangi pada tahun 2011 sebanyak 802.478 orang dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 1.772.827 orang. Pertumbuhan pengunjung ODTW Kabupaten Jember dalam lima tahun terakhir mencapai 61,82 persen, sedangkan Kabupaten Banyuwangi mencapai 120,91 persen. Data tersebut menjelaskan bahwa objek wisata Kabupaten Banyuwangi lebih diminati dibanding dengan objek wisata Kabupaten Jember.

Peningkatan jumlah pengunjung ODTW ke Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari banyaknya objek wisata yang dapat di akses, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata kota, dan wisata religi. Selain banyaknya objek wisata yang ditawarkan, pemerintah kabupaten Banyuwangi juga menggelar berbagai festival dan atraksi wisata guna menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Adapun festival dan atraksi wisata yang pernah diadakan menurut banyuwangitourism.com adalah BEC (*Banyuwangi Ethno Carnaval*), Festival Sepuluh Ribu Kopi, Festival Kuwung, Festival Perahu Layar di Selat Bali, Ijen *Summer Jazz Banana*, Banyuwangi Batik Festival, *Underwater Festival*, Festival Gandrung Sewu, *Kite and Wind Surfing*, dan sebagainya.

Adapun prestasi atau penghargaan yang didapat oleh Bupati Banyuwangi baru-baru ini adalah UNWTO *Award for Excellence and Innovation in Tourism* untuk kategori inovasi kebijakan publik dan tata kelola. Semangatbanyuwangi.com mengatakan, bahwa;

“Kabupaten berjuluk *the sunrise of java* tersebut berhasil meraih penghargaan tersebut dari badan urusan pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Madrid, Spanyol pada 20 Januari 2016. Adapun prestasi dan penghargaan lain yang pernah didapat oleh Kabupaten Banyuwangi adalah *investment award* 2014, Banyuwangi Kota Welas Asih, Penghargaan Marketing Champion”. <http://www.semangatbanyuwangi.com/2015/04/15-penghargaan-bergengsi-untuk-kabupaten> [diakses 16/12/2016]

Pada waktu yang sama seiring dengan kemajuan sektor pariwisata, kabupaten banyuwangi dapat menurunkan TPT secara signifikan dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain. Menurut BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misalnya TPT 6 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Berikut penulis mencoba mengulas TPT di Kabupaten Banyuwangi pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota tahun 2011 dan 2015

Kabupaten/Kota	Tahun, TPT dalam %		Penurunan TPT
	2011	2015	
Banyuwangi	6,06	2,55	3,51 %
Jember	3,34	4,77	-1,43 %
Situbondo	4,77	3,57	1,20 %
Bondowoso	3,01	1,75	1,26 %
Probolinggo	2,80	2,51	0,29 %

Sumber: diolah berdasarkan data BPS Jawa Timur

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa dari tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,51 persen. Persentase ini merupakan terbesar dari empat kabupaten yang ada di tapal kuda, disusul oleh Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Jember. Penurunan signifikan yang diupayakan oleh Kabupaten Banyuwangi perlu untuk diapresiasi, dengan demikian penulis menilai penurunan TPT tersebut bukanlah suatu yang kebetulan. Penulis menilai bahwa penurunan TPT secara signifikan di Kabupaten Banyuwangi, ada kaitannya dengan pengembangan pariwisata yang pesat di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai **“kontribusi sektor pariwisata dalam menyerap tenaga**

**kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015”** dengan pendekatan **kuantitatif deskriptif** karena menurut Afrizal (2014), “dalam penelitian kata masalah tidak selalu berarti ketimpangan antara hal-hal yang diharapkan dengan yang terjadi, tidak pula selalu berarti hal hal yang tidak disukai atau sesuatu yang tidak beres. Masalah penelitian adalah adanya hal yang perlu dilakukan untuk mengetahuinya, sedangkan masalah sosial adalah hal-hal yang dirisaukan oleh banyak orang dan biasanya terkait dengan adanya perbedaan antara yang diinginkan dengan yang terjadi, masalah sosial dapat menjadi masalah penelitian tetapi tidak semua masalah penelitian merupakan masalah sosial”. Hal serupa juga dijelaskan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2000). Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2000:93), “masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban”.

## 1.2 Rumusan masalah

Suatu penelitian, perumusan masalah adalah hal yang sangat penting karena dalam kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan petunjuk yang lebih baik, terarah, dan terdorong untuk mengetahui jawabannya. Menurut Arikunto (2002:22) agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-bainya, maka penelitian harus merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa. Menurut Silverman (1985) dalam Afrizal (2014), ada lima macam dasar penemuan dan perumusan masalah penelitian.

1. Masalah penelitian berdasarkan kepada kepedulian seseorang terhadap teori.
2. Adanya persoalan atau perbedaan metodologis.
3. Adanya suatu teka-teki atau persoalan yang perlu dijawab (*a puzzle datum*).
4. Adanya kesenjangan antara harapan dan realitas.
5. Penelitian karena ingin merumuskan ide-ide pemecahan masalah.

Apabila suatu masalah dalam penelitian telah diperoleh, maka perlu ditentukan ruang lingkungannya. Ruang lingkup permasalahan dalam suatu penelitian sangat penting agar peneliti tidak terjerumus dengan banyaknya data-data yang tidak relevan dalam proses mendapatkan data. Berdasarkan pendapat di atas maka rumusan masalah diperlukan untuk memberikan arah dan petunjuk dalam pengumpulan data sehingga tercapainya hasil yang konsisten. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“berapa kontribusi penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan bagaimana jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, usia serta tingkat pendidikan?”**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menunjukkan agar peneliti lebih mudah dalam melaksanakan proses penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Mendeskripsikan kontribusi penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin, usia, serta tingkat pendidikan”.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil yang akan dicapai, baik manfaat secara teoritis (untuk kepentingan ilmu pengetahuan) maupun manfaat empiris. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah penelitian-penelitian tentang ilmu ekonomi makro khususnya ketenagakerjaan dan tentang pariwisata. Selain itu secara teoritis penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sendiri guna menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat bersikap ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Manfaat empiris. Bagi instansi terkait khususnya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Universitas Jember dapat menjalin hubungan baik

sehingga terciptanya komunikasi aktif, selain itu informasi terkait penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi-instansi yang ada di Kabupaten Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris), serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Kajian teori dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut:

1. mengumpulkan pendapat atau teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
2. membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah;
3. membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori;
4. menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Menurut Faisal (2005:263), pada bab dua tentang pembahasan kepustakaan (tinjauan pustaka) sangat bergantung pada topik masalah atau bangunan teori yang melandasi pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk menunjukkan konsep, teori, data, temuan-temuan yang bersangkutan-paut dengan masalah penelitian, sehingga masalah yang diteliti menjadi lebih jelas.

Pada penelitian ini, penelitian mencoba menunjukkan sejumlah konsep terkait masalah yang diteliti yang saling berhubungan, sehingga penelitian ini semakin lebih jelas. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. otonomi daerah dan desentralisasi (berfungsi menjelaskan kewenangan daerah era otonomi daerah);
2. perencanaan pembangunan era otonomi daerah (berfungsi menjelaskan tujuan dan tahapan perencanaan);
3. pariwisata (berfungsi menjelaskan definisi serta maksud dari pariwisata, sehingga jelas maksud dari konsep pariwisata);
4. pengangguran dan penyerapan tenaga kerja;
5. kontribusi Sektor Pariwisata (menjelaskan lebih rinci makna kontribusi yang dimaksud).

## 2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Memahami sebuah konsep otonomi daerah, alangkah baik terlebih dahulu memahami pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2011:76), “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah desentralisasi juga perlu dipahami dalam konsep otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari keberhasilan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Rondinelli dalam Suwandi (2015), desentralisasi adalah tranfer wewenang dan tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik, dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan yang berada dibawahnya, yang kemudian dibagi menjadi 4 kelompok yaitu dekonsentrasi, pendelegasian, devolusi, privatisasi.

1. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis herarki dengan pemerintahan pusat di daerah.
2. Pendelegasian. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada diluar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
3. Devolusi. Devolusi adalah pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan. Devolusi juga dapat diartikan pihak pemerintah daerah mendapat diskresi yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.
4. Privatisasi. Privatisasi adalah pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang

kepada organisasi tersebut untuk ambil bagian dalam proses pembangunan nasional.

Otonomi daerah dan desentralisasi memang berjalan seiring, namun keduanya mempunyai makna sendiri. Menurut Stewart dan Pide dalam Suwandi (2015), istilah otonomi daerah cenderung pada aspek politik tentang kekuasaan negara, sedangkan istilah desentralisasi cenderung pada aspek administrasi. Hakikatnya, tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah menumbuhkembangkan potensi yang ada di daerah sehingga terciptanya kemandirian suatu daerah. Menurut widjaja (2011:76), tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang;
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. menumbuhkan kemandirian daerah;
4. meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Pembagian urusan pemerintahan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan tercapai dengan baik tanpa adanya pembagian urusan pemerintahan yang jelas. Selain itu, pembagian urusan ini juga bertujuan menghindari kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak saling berbenturan. Pembagian urusan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun urusan tersebut meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

*Pertama* urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan tersebut, atau melimpahkan wewenang

kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

*Kedua* urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Adapun urusan pemerintahan konkuren dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab Sepuluh

Urusan Pemerintahan Konkuren		
Urusan Pemerintahan Wajib		Urusan Pemerintahan Pilihan
Terkait Pelayanan Dasar	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
1. Pendidikan	1. Tenaga kerja	1. Kelautan dan perikanan
2. Kesehatan	2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2. Pariwisata
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang	3. Pangan	3. Pertanian
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	4. Pertahanan	4. Kehutanan
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	5. Lingkungan hidup	5. Energi dan sumberdaya mineral
6. Sosial	6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	6. Perdagangan
	7. Pemberdayaan masyarakat dan desa	7. Perindustrian
	8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	8. Transmigrasi
	9. Perhubungan	
	10. Komunikasi dan informatika	
	11. Koperasi dan usaha kecil, dan menengah	
	12. Penanaman modal	
	13. Kepemudaan dan olahraga	
	14. Statistik	
	15. Kebudayaan	
	16. Perpustakaan dan kearsipan	

*Ketiga* urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun urusan pemerintahan umum meliputi:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. dan lain sebagainya.

Perlu diingat, agar urusan pemerintahan tersebut berjalan dengan semestinya, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun asas tersebut tercantum pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggara negara;
3. kepentingan umum;
4. keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efisiensi;
9. efektivitas;
10. keadilan.

## 2.2 Perencanaan Pembangunan Era Otonomi Daerah

“Konsep otonomi daerah menyangkut dengan dua hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self Government*). Berdasarkan pernyataan

tersebut, pada era otonomi daerah, daerah otonom mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri”, (Sarundajang dalam Sjafrizal, 2014). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Hidayat syarief dalam Sjafrizal (2014:106), “pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukannya otonomi daerah”. Tiga alasan pokok tersebut meliputi:

- *political equality* yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat ditingkat daerah;
- *local accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat daerah;
- *local responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi yang terjadi di daerah.

Menurut Widjaja (2011:2), “inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah”. Menurut Sjafrizal (2014) pada konteks pembangunan daerah, untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam perencanaannya perlu adanya unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Adapun unsur pokok tersebut meliputi kondisi umum daerah, visi dan misi pembangunan daerah, sasaran dan target pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan prioritas pembangunan daerah.

1. Kondisi umum daerah. Penyusunan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah biasanya dimulai dengan analisis tentang kondisi umum suatu daerah. Analisis ini sangat penting untuk mengetahui secara jelas kondisi objektif suatu daerah, yang selanjutnya akan dijadikan landasan dalam menyusun rencana ke depan. Analisis tentang kondisi umum biasanya meliputi aspek geografis, sumberdaya alam, agama dan

budaya, penduduk dan sumberdaya manusia, potensi ekonomi daerah, hukum, dan lain-lain.

- Aspek geografis yang perlu dianalisis adalah hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap kegiatan pembangunan secara keseluruhan seperti letak dan posisi daerah, kondisi lingkungan, abrasi pantai, dan sebagainya.
  - Aspek sumberdaya alam yang perlu dibahas seperti jenis dan kualitas lahan bagi kegiatan pertanian, dan potensi lainnya seperti potensi wisata yang membawa keuntungan bagi daerah.
  - Aspek sosial dimulai dengan analisis tentang agama dan budaya yang dianut masyarakat setempat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan upaya percepatan pembangunan daerah.
  - Penduduk dan sumberdaya manusia merupakan aspek penting lainnya yang harus dibahas dalam kondisi umum daerah. Alasannya jelas karena penduduk merupakan sasaran akhir dari kegiatan pembangunan daerah. Dalam analisis sumberdaya manusia yang perlu dibahas paling kurang menyangkut pendidikan, kesehatan, tingkat pengangguran dan kemiskinan.
2. Visi dan misi pembangunan daerah. Setiap perencanaan pembangunan, baik jangka panjang dan menengah, disusun mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. hal ini dilakukan agar perencanaan mengacu pada tujuan yang telah disepakati. Perlu dibedakan antara visi nasional atau daerah dengan visi kepala daerah. Visi nasional atau daerah adalah visi dari seluruh masyarakat pada negara atau daerah bersangkutan. Visi tersebut biasanya dirumuskan untuk jangka panjang (20 tahun) dan ditetapkan formal oleh DPR di tingkat nasional dan DPRD di tingkat daerah sebagai wakil rakyat. Sedangkan visi kepala negara atau daerah ditawarkan oleh calon kepala negara atau daerah dalam Pemilihan Presiden (PILPRES) atau Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Bila visi ini diterima yang ditandai kemenangan calon, maka akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

3. Sasaran dan target pembangunan daerah. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Sedangkan target adalah sasaran yang lebih konkret yang dicapai pada waktu tertentu. Penentuan sasaran dan target pembangunan daerah memerlukan teknik proyeksi tertentu karena menyangkut dengan prediksi masa depan. Proyeksi dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan (*trend*) dengan memperhatikan data dan fakta. Bila cara ini dianggap kurang logis, maka proyeksi dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam melakukan investasi.
4. Strategi pembangunan daerah. Menurut Sjafrizal (2014) strategi pada sektor publik dapat meniru strategi sektor bisnis dengan beberapa penyesuaian, namun tetap selaras dalam dengan tujuan sasaran yaitu meningkatkan hasil dan perbaikan citra. Berdasarkan sifatnya, strategi pembangunan dibedakan menjadi dua yaitu menyeluruh dan parsial.
  - Strategi menyeluruh berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan dan investasi;
  - Strategi parsial berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
5. Kebijakan pembangunan daerah. Pada dasarnya kebijakan merupakan keputusan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah. Perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu memperhatikan visi dan misi pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan dan proyeksi pembangunan ke depan.
6. Pada konteks pembangunan misalnya pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara dan daerah mempunyai keterbatasan tertentu baik dari segi dana, tenaga kerja, sumberdaya, dan sebagainya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, daerah perlu membuat suatu prioritas pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan secara

optimal. Menurut Sjafrizal (2014:63), prioritas pembangunan biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu, meliputi:

- program dan sektor yang diprioritaskan sebaiknya berhubungan erat dengan visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan semula. Sehingga pencapaian visi dan misi tersebut menjadi lebih terjamin sesuai dengan janji yang diberikan pada masyarakat;
- program dan sektor yang diprioritaskan sebaiknya mencakup sebagian besar dari kehidupan sosial ekonomi suatu daerah;
- kegiatan dan sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan mempunyai keuntungan komperatif tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- program dan kegiatan tersebut dapat bersinergi dengan kegiatan lainnya sehingga pembangunan secara keseluruhan akan menjadi lebih maju dan berkembang;
- program dan kegiatan haruslah layak, dalam arti memberikan manfaat yang besar;
- program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi sosial ekonomi suatu daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tidak mendapatkan reaksi negatif.

### **2.3 Pariwisata**

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memungkinkan melakukan pembangunan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata, dengan memperhatikan kondisi umum serta potensi daerah. Perencanaan yang matang tentu akan menguntungkan daerah, pariwisata yang semakin berkembang akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Pada era globalisasi, sektor pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Soebagyo (2012) menjelaskan, “tahun 2011 perolehan devisa negara dari pariwisata diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar, naik 11.8 persen dibandingkan tahun 2010”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Spilane (1987), “pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu”. Menurut Spilane (1987), pariwisata terbagi atas beberapa jenis yaitu:

1. pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*);
2. pariwisata untuk berekreasi (*recreation tourism*);
3. pariwisata untuk budaya (*culture tourism*);
4. pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*);
5. pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*);
6. pariwisata untuk konvensional (*conventional tourism*).

Definisi tentang pariwisata yang berkembang di dunia sangat beragam, multidimensi, dan sangat terkait dengan latar belakang keilmuan pencetusnya. Menurut Utama (2014), pada dasarnya definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu melihat pariwisata dari sisi *demand* saja, melihat pariwisata dari sisi *supply* saja, melihat pariwisata dari sisi *demand* dan *supply*. Kategori pertama merupakan definisi pariwisata yang didekati dari sisi wisatawan, sangat kental dengan dimensi spasial yakni tempat dan jarak. Kategori kedua pariwisata dipandang dari dimensi industri dan bisnis. Kategori ketiga memandang pariwisata dari dimensi akademis dan sosial budaya.

1. Dimensi spasial. Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi spasial merupakan definisi yang berkembang lebih awal dibandingkan dengan definisi lain (Gartner dalam Utama, 2014). Dimensi ini menekankan definisi pariwisata pada pergerakan wisatawan ke suatu tempat untuk waktu sementara.
2. Dimensi industri. Pada sisi *supply* pariwisata lebih banyak dilihat sebagai industri. Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi ini

memfokuskan pada keterkaitan barang dan jasa untuk memfasilitasi perjalanan wisata.

3. Dimensi akademis. Dimensi akademis, mendefinisikan secara lebih luas, tidak hanya melihat satu sisi tetapi melihat keduanya sebagai dua aspek yang saling berkaitan.
4. Dimensi sosial budaya. Dimensi ini menitikberatkan definisi pariwisata pada usaha memenuhi kebutuhan wisatawan, interaksi antara elemen lingkungan fisik, ekonomi, sosial, budaya. Pada dimensi ini, definisi pariwisata dipandang luas sama halnya dengan dimensi akademis.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat disimpulkan bahwa pariwisata tidak hanya dipandang sebagai perjalanan wisata, akan tetapi perjalanan wisata yang ditunjang oleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan tentang usaha yang terkait dengan pariwisata. Usaha tersebut meliputi:

1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan liburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta;
13. spa.

Menurut Joyosuharto (2000), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi pokok yaitu menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan

kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Pendit (1990) menjelaskan bahwa pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan bagi dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan, mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.

Dampak pengembangan pariwisata memang sangat dirasakan terhadap sosial ekonomi maupun sosial budaya. Menurut Utama (2014:146), dampak pengembangan pariwisata terhadap perekonomian adalah *foreign exchange earnings* (bertumbuhnya bisnis valuta asing), *contributions to government revenues* (peningkatan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah), *infrastructure development* (mendorong penyediaan infrastruktur), *development of local economies* (peningkatan perekonomian masyarakat local), *employment generation* (penciptaan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja). Ternyata kontribusi pengembangan pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja juga cukup besar. Utama (2014:150) menjelaskan, “WTO mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap penyediaan lahan pekerjaan sebesar 7% secara internasional. Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industri pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar”. Sedangkan menurut Mitchell dan Ashley dalam Utama (2014:151), menyebutkan “sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti. Indeks terbesar terjadi di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Philipines, Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93”.

Dapat disimpulkan, pengembangan pariwisata mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi solusi dalam penyelesaian masalah di banyak negara. Sehingga

masalah-masalah yang terjadi dibanyak negara termasuk di Indonesia seperti pengangguran, dan kemiskinan dapat diselesaikan dengan optimal.

#### 2.4 Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Alasannya, tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Menurut Sjafrizal (2014), “secara umum pengukuran tingkat pengangguran ditentukan oleh dua unsur yaitu jumlah pencari kerja, kemampuan penyediaan atau penyerapan tenaga kerja di suatu daerah”.

Menurut Suroto (1992), pengangguran adalah orang yang mampu bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan ingin bekerja atau baik secara aktif maupun pasif mencari pekerjaan. Pengangguran adalah kejadian atau keadaan orang sedang menganggur. Pada konteks makro ekonomis pengangguran adalah sebagian dari angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Pada konteks mikro ekonomi, pengangguran adalah keadaan orang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan, akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan. Samuelson dalam Harjanto (2014), “definisi pengangguran (*unemployed*) adalah orang yang tidak bekerja namun giat mencari pekerjaan atau sedang dipanggil kembali untuk bekerja di suatu perusahaan”. Dapat disimpulkan, seseorang dikatakan menganggur apabila dia tidak bekerja, berusaha mencari pekerjaan, baru diberhentikan dari pekerjaan, sedang mempersiapkan lamaran pekerjaan.

Harjanto (2014) menjelaskan, dalam kajian ekonomi terdapat beberapa bentuk pengangguran dan jenis pengangguran. Adapun bentuk pengangguran adalah sebagai berikut:

1. pengangguran friksional. Pengangguran friksional muncul karena perpindahan orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pengangguran friksional akan selalu terjadi walaupun perekonomian dalam kondisi pengerjaan penuh. Hal ini terjadi karena adanya tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja maupun

para pekerja yang berpindah pekerjaan untuk mendapatkan upah yang lebih baik;

2. pengangguran sikikal. Pengangguran jenis ini terjadi karena permintaan total tidak memadai untuk membeli semua keluaran yang dapat dihasilkan oleh angkatan kerja dalam kondisi ekonomi dalam pengerjaan penuh;
3. pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri, atau lokasi geografis dengan struktur permintaan tenaga kerja.

Muhdar (2015) menjelaskan jenis-jenis pengangguran. *Pertama* pengangguran terselubung, *kedua* setengah menganggur, *ketiga* pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Setengah menganggur adalah tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena minimnya lapangan pekerjaan, dan biasanya bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan pengangguran pada umumnya terjadi karena minimnya lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan tenaga kerja yang terserap juga sedikit.

Menurut Kuncoro (2002), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Demi terserapnya tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan terkait kebijakan kesempatan kerja. Kebijakan kesempatan kerja adalah kebijakan yang bertujuan memberikan dorongan pada perluasan kesempatan kerja. Suroto (1992) menjelaskan empat macam kebijakan

kesempatan kerja meliputi kebijakan kesempatan kerja umum, kebijakan kesempatan kerja sektoral, kebijakan kesempatan kerja khusus, dan kebijakan pembangunan daerah.

*Pertama*, kebijakan kesempatan umum diupayakan dengan menimbulkan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan dunia usaha. Dorongan pada perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan menggunakan alat-alat kebijakan ekonomi, keuangan dan kebijakan lain yang mendorong investasi. *Kedua*, kebijakan pembangunan sektoral dilakukan dalam rangka pembangunan nasional, daerah, dan desa. Pembangunan sektoral diupayakan dengan melihat potensi pada setiap sektor, sehingga pembangunan yang dilakukan akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. *Ketiga*, kebijakan kesempatan kerja khusus menekankan pada perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang tergolong pengangguran bersifat khusus, seperti tenaga kerja cacat jasmani, pemuda, wanita, dan tua. *Keempat*, kebijakan pembangunan daerah hampir sama dengan kebijakan pembangunan sektoral, akan tetapi pembangunan daerah memiliki cakupan yang lebih luas dan mengacu pada visi pembangunan daerah.

## 2.5 Kontribusi Sektor Pariwisata

Kata kontribusi sering digunakan dalam berbagai kajian ilmiah. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), berarti uang iuran (kepada perkumpulan dsb), sumbangan. Bertumpu pada pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kontribusi bisa dimaknai sebagai sumbangan baik berupa materi maupun non materi. Adapun sumbangan berupa materi seperti uang yang dipinjamkan dan sebagainya sehingga berdampak nyata, sedangkan non materi seperti perilaku yang membawa dampak positif.

Pada penelitian ini, penulis mencoba menarik makna yang luas dari sebuah kata kontribusi. Sumbangan yang diberikan kepada seseorang dapat dimaknai sumbangan tersebut bermanfaat. Pada konteks penelitian ini, penulis mencoba mendeskripsikan apakah pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dapat bermanfaat kepada penyerapan tenaga kerja dan bermanfaat dalam pengentasan pengangguran di Kabupaten Banyuwangi. Dalam konteks kuantitas,

penulis menghitung kontribusi (bersifat materi) sektor pariwisata dalam menyerap tenaga kerja dengan mengklasifikasikan berbagai sektor berdasarkan klasifikasi lapangan pekerjaan utama atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 sesuai yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lebih jelasnya kontribusi yang dimaksud adalah persentase orang yang bekerja di sektor pariwisata terhadap total pekerja di Banyuwangi.

Tabel 2.2 Klasifikasi Lapangan Pekerjaan Utama menurut BPS

No	Lapangan Pekerjaan Utama
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2	Pertambangan dan Penggalian
3	Listrik, Gas, Air
4	Industri Pengolahan
5	Bangunan
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Sumber: diolah berdasarkan data BPS

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan lapangan pekerjaan utama berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009 (tercantum dalam publikasi keadaan angkatan kerja 2015), akan tetapi masih menggunakan domain Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009 adalah klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, dengan cakupan seluruh kegiatan ekonomi dalam penciptaan barang atau jasa. Pada KBLI 2009 atau dengan penafsiran berdasarkan domain KLUI 1990, maka terlihat cakupan sejumlah kategori lapangan usaha, berikut penulis deskripsikan kategori-kategori tersebut.

- Kategori (Pertanian, Kehutanan, Perikanan). Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, pengambilan dan penanaman hasil hutan, penangkapan dan budidaya ikan/biota laut. Berikut lebih detail terkait cakupan kategori.
- Kategori (Pertambangan dan Penggalian). Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan biji logam), cair (minyak bumi), dan gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, pertambangan di dasar laut. Kategori ini mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan, seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam, dan aglomerasi bahan bakar padat.
- Kategori (Industri Pengolahan). Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Kategori industri pengolahan di sini adalah mengolah bahan-bahan menjadi produk baru atau melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain.
- Kategori (Listrik, Gas, Air). Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, penampungan air, penjernihan, serta penyaluran air bersih kepada rumah tangga, industri, atau pengguna komersial lainnya.
- Kategori (Kontruksi/Bangunan). Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha dibidang kontruksi, yaitu kegiatan kontruksi umum dan kontruksi khusus seperti pekerjaan bangunan dan bangunan sipil. Kegiatan kontruksi berkaitan dengan pekerjaan baru, perbaikan,

penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek, serta kontruksi yang bersifat sementara.

- Kategori (Perdagangan Besar, Eceran). Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi, atau kepada pedagang lainnya. Perdagangan eceran merupakan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi seperti kios pedagang keliling dan sebagainya.
- Kategori (Rumah Makan, serta Hotel). Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung serta penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera.
- Kategori (Transportasi dan Pergudangan). Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang dan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, maupun udara.
- Kategori (Informasi dan Komunikasi). Kategori ini mencakup produksi atau distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data serta kegiatan jasa informasi untuk umum.
- Kategori (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori ini mencakup jasa keuangan, termasuk asuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan.
- Kategori (*Real Estate* dan Jasa Perusahaan). Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen atau perantara dalam penjualan atau pembelian *real estate*, penyewaan atau penyedia jasa *real estate* lainnya. Jasa perusahaan mencakup jasa hukum dan notaris, jasa akuntan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa teknik arsitektur, jasa periklanan, jasa riset, jasa perusahaan lainnya.

- Kategori (Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan). Kategori ini mencakup jasa kebersihan, kegiatan organisasi, jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga, dan jasa transportasi wisata, dan jasa kegiatan lainnya.

Utama (2014:127) menjelaskan, kepariwisataan mencakup daya tarik wisata, hotel atau akomodasi, pelayanan imigrasi, restoran atau rumah makan, pusat perbelanjaan dan juga transportasi. Sedangkan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan, usaha-usaha pariwisata (kepariwisataan) mencakup daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan liburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa.

Perhitungan serapan tenaga kerja sektor pariwisata, tidak lepas dari perhitungan serapan tenaga kerja sektor kepariwisataan. Menurut Medlik dalam Utama (2014:5), ada empat aspek yang diperhatikan dalam penawaran produk pariwisata sebagai sebuah totalitas produk, yakni:

1. *attraction* (daya tarik). Suatu daerah wisata mempunyai daya tarik untuk menarik wisatawan ke suatu tujuan wisata atau destinasi, baik berupa alam, masyarakat dan budaya;
2. *accessability* (transportasi). Tersedianya alat-alat transportasi agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata;
3. *amenities* (fasilitas). Suatu tujuan wisata mempunyai sejumlah fasilitas pendukung maupun fasilitas utama, seperti akomodasi, restoran, pusat oleh-oleh atau perbelanjaan, dan fasilitas lainnya;
4. *ancillary* (kelembagaan). Suatu daerah wisata mempunyai lembaga penyelenggaraan wisatawan, seperti biro perjalanan, pemandu wisata, pemesanan tiket, dan sebagainya.

Jurnal ekonomi pembangunan, Akuino (2013) mengelompokkan sektor pariwisata menjadi tiga sektor. Adapun sektor-sektor tersebut sesuai dengan

lapangan pekerjaan utama (data BPS) antara lain: sektor perdagangan, sektor perhotelan, dan sektor restoran. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan subsektor atau kategori yang tergolong kepada usaha-usaha sektor pariwisata (kepariwisataan) jika mengarah kepada data BPS untuk mempermudah mendeskripsikan persentase penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata. Adapun subsektor atau kategori yang tergolong usaha-usaha sektor pariwisata (kepariwisataan) yaitu kategori 6 (perdagangan, rumah makan dan hotel).

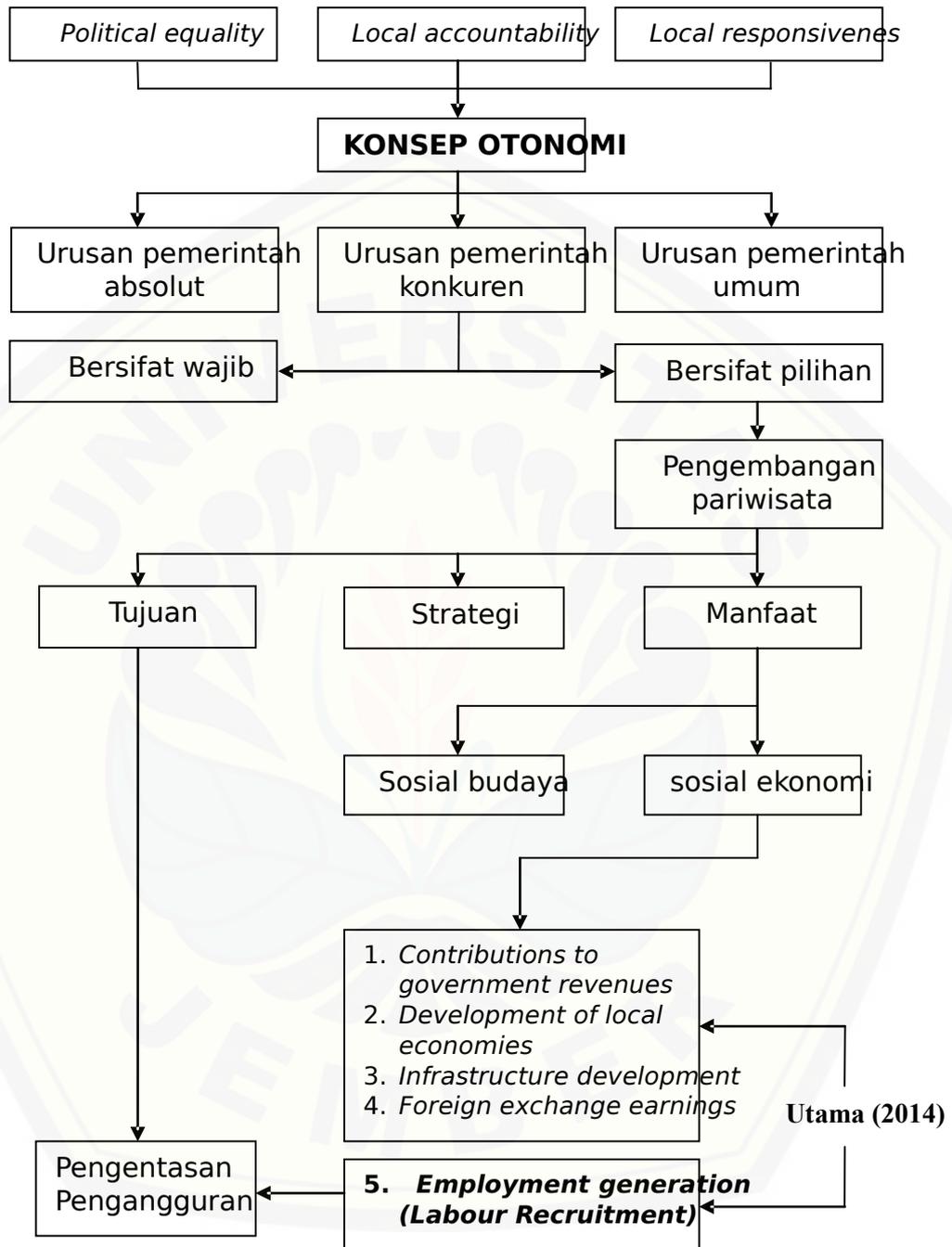
## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (kajian empiris) berisi penulisan-penulisan penelitian penelitian sebelumnya yang mendukung kajian yang akan dilakukan. Penyajiannya dapat bentuk narasi dan/atau matrik.

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu tentang penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Candra Rizkhi (2015)	Peran Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2010-2014	Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2010-2014, penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami kenaikan dan elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah bersifat elastis.
2.	Sasongko dan Triwijayanti (2013)	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan dan Restoran di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	Sektor hotel dan restoran berperan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto. Dilihat dari peningkatan jumlah hotel dan restoran di tiap tahunnya.
3.	Kurniawan <i>et al.</i>	Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)	Kemitraan pengelolaan sektor pariwisata mengenai pemanfaatan lahan Tirta Wisata antara Disporabudpar dengan swasta mengalami keuntungan. Disporabudpar memperoleh keuntungan dari sewa sedangkan swasta masyarakat lokal juga memperoleh keuntungan dari rekrutmen tenaga kerja .

2.7 Kerangka Konseptual



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap realibel dan efisien karena pengetahuan ilmiah dan dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut Usman dan Akbar (2009:41), metode adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut Usman dan Abdi (2012:1) metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

Berdasarkan banyak pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Adapun cara penelitian yang dimaksud adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, serta menyusun suatu laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Definisi operasional variabel.
4. Data dan sumber data.
5. Teknik pengumpulan data.
6. Teknik penyajian dan analisis data.

### 3.1 Pendekatan Penelitian (Jenis Penelitian)

Pada latar belakang, penulis telah menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, Arikunto dalam Prastowo (2012:11) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil suatu variabel, gejala, atau objek penulisan. Usman dan Abdi (2012:8) menjelaskan secara rinci perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ditinjau secara tujuan, penelitian kuantitatif bertujuan menegakkan fakta-fakta dengan mengumpulkan data berupa angka, data tersebut dianalisis menjadi sebuah informasi ilmiah.

Tabel 3.1 Penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut Usman dan Abdi (2012:8)

Aspek	Penelitian Kualitatif	Penelitian Kuantitatif
Masalah yang diteliti	Menekankan pada semua variabel, jika dimungkinkan dijadikan permasalahan yang diteliti lebih mendalam	Menekankan pada beberapa variabel
Tujuan	Mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal	Menguji teori dan menegakkan fakta-fakta
Pola	Kelapangan - mencari dan menemukan data - data dicocokkan dengan teori - teori bersifat <i>bottom up</i>	Ada masalah - berteoris - berhipotesis - ke lapangan - mengumpulkan data - menguji hipotesis - teori bersifat <i>top down</i>
Sifat	Deskriptif	Deskriptif, komparatif, asosiatif
Kebenaran	Emik	Etik
Asumsi	Realitas bersifat dinamis	Realitas bersifat statis
Objek yang diteliti	Perilaku manusia, proses kerja	Perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam
Desain penelitian Responden dan sampel	Studi kasus Secara <i>purposive</i>	Survei, studi kasus, eksperimen Secara acak ( <i>random</i> ), memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara <i>random</i>
Kedekatan peneliti dengan data atau informan	Sangat dekat dengan data yang diambil	Peneliti mengambil jarak dengan informan atau responden yang diteliti
Metode pengumpulan data	Lebih menekankan pada wawancara dan observasi	Angket, wawancara, observasi
Analisis	Tidak menguji hipotesis	Menguji hipotesis
Hasil penelitian	Tidak dapat digeneralisasi	Dapat digeneralisasi

### 3.2 Tempat dan waktu penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) menjelaskan bahwa, tempat penelitian mencakup lokasi suatu penelitian sedangkan waktu mencakup kapan suatu penelitian dilakukan. Tempat dan waktu penelitian disertakan pertimbangan logis sehingga penentuan lokasi beserta waktu penelitian dapat membantu suatu penelitian secara maksimal. Pada latar belakang, penulis telah mengulas bahwa penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, dan penulis telah menyinggung beberapa alasan. Tentu alasan tersebut tidak terlepas dari isu yang terdapat pada penelitian ini. Adapun alasan-alasan tersebut meliputi:

1. pada lima tahun terakhir yakni dari tahun 2011-2015, sektor pariwisata kabupaten banyuwangi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut bisa lihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke Banyuwangi. Pada tahun 2011-2015 pengunjung mengalami kenaikan sebesar 970.349 pengunjung;
2. pada tahun 2011-2015 Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,51 persen;
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mendapatkan sejumlah prestasi atau penghargaan dibidang pariwisata;

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini di beberapa instansi pemerintah. Adapun instansi pemerintah tersebut yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan. Pertimbangan waktu penelitian didasarkan pada keterbatasan biaya, dan keterbatasan waktu, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan april sampai dengan bulan juni 2017.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Arikunto (1998:99) menjelaskan, variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian bagi seorang peneliti. Selanjutnya Singarimbun (1995:25) menjelaskan, definisi operasional pada

penelitian adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional yang dimaksud adalah untuk memberikan rujukan empiris serta menggambarkan secara tepat variabel yang dimaksud. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2009:13) menjelaskan, definisi operasional variabel adalah uraian terbatas pada istilah atau frasa kunci yang digunakan dalam penelitian dengan makna tunggal dan terukur. Definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kontribusi Sektor Pariwisata (Variabel bebas)  
adalah sejumlah tenaga kerja yang mampu diterima di sektor pariwisata yang dilihat dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran.
2. Tenaga Kerja (Variabel terikat)  
adalah penduduk berusia 15 ke atas yang telah menghasilkan produk atau jasa yang dilihat dengan banyaknya orang yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data memiliki peranan penting dalam penulisan. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis, dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah terkait topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif baik berupa angka maupun bukan angka.

Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*". Sedangkan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data tersebut dapat penulis klasifikasikan antara lain:

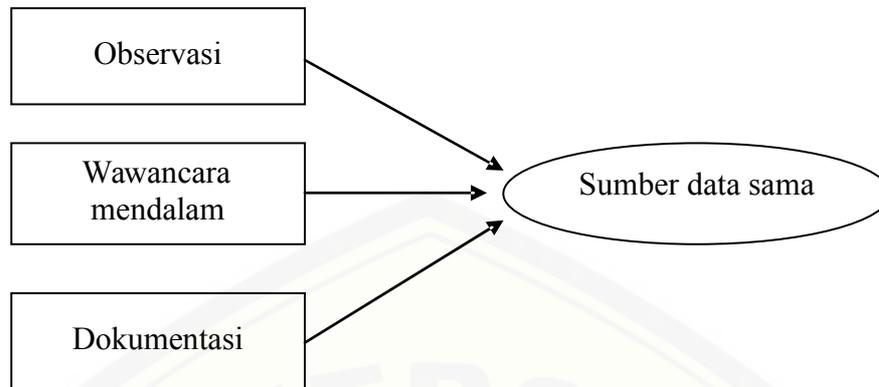
1. data primer terkait interview dengan sejumlah informan;
2. data sekunder mengenai dokumen-dokumen terkait yakni Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, *website*, dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi, data Badan Pusat Statistik, jurnal penelitian, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

### **3.5 Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data atau temuan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui drajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti telah melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

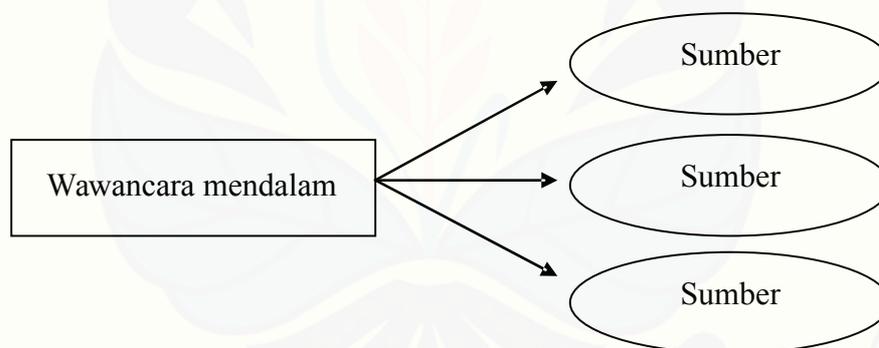
Menurut Sugiono (2006:330), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

1. Triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2006:330) bahwa triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2: triangulasi teknik menurut Sugiyono (2006:331)

2. Triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2006:330), triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3: triangulasi sumber menurut Sugiono (2006:331)

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2006:63), dalam pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka teknik yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini lebih ditekankan pada wawancara, dan dokumentasi.

### 3.6.1 Wawancara

Menurut Usman dan Abdi (2012:219), wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan informan yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada disekitar masalah yang diobservasi. Wawancara juga memudahkan peneliti mendapatkan informasi jika peneliti merasa sulit mendapatkan informasi dari jalan lain terkait topik yang diteliti. Menurut Usman dan Abdi (2012:219), berdasarkan tujuannya wawancara dibedakan menjadi tiga yang meliputi:

1. *nondirective interview*. Lazimnya cara ini dapat dikatakan *interview* secara bebas, dalam arti bahwa peneliti membiarkan informan memberikan keterangan atau informasi secara luas. Kemudian ketika jawaban dipandang sesuai, barulah peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih rinci;
2. *focused interview*. Cara ini dikatakan sebagai *focused interview* karena sejak awal wawancaranya sudah diarahkan ke fenomena yang hendak diteliti. Pertanyaan-pertanyaan sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga diharapkan jawaban-jawaban dari informan tersebut akan menjurus ke tujuan tertentu;
3. *repeated interview*. Cara ini bertujuan ingin mengetahui perubahan-perubahan dalam jangka waktu tertentu.

Pada penelitian ini, penulis memilih *focused interview* dengan alasan cara ini penulis anggap sebagai cara yang lebih mudah dalam melakukan penelitian, sehingga jawaban-jawaban informan sesuai dengan topik penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam suatu penelitian sangatlah beragam, oleh sebab itu pada penelitian ini penulis mencoba mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan agar lebih mudah dipahami. Cara untuk mengklasifikasikan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara menurut Patton dalam Basrowi dan Suwandi (2008:131), pertanyaan tersebut menyangkut:

1. pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku;
2. pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai;

3. pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan;
4. pertanyaan tentang pengetahuan;
5. pertanyaan yang berkaitan dengan indra;
6. pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi.

### 3.6.2 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206), studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih kredibel bila didukung oleh dokumen seperti catatan, gambar, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2006:270).

Dokumen dan *record* digunakan untuk penelitian, menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:159), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut.

1. Dokumen digunakan karena sumber yang lebih stabil, kaya, dan mendorong.
2. Berguna sebagai “bukti” untuk pengujian.
3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang ilmiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
4. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
5. Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
6. Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Menurut Usman dan Abdi (2012:224), Berkenaan dengan pengumpulan data, sering dinyatakan bahwa tidak ada alat pengumpulan data yang sempurna. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan pada suatu alat pengumpulan data, maka peneliti mencoba mengkombinasikan beberapa alat yang sering disebut dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah salah satu cara untuk

meminimalisir kelemahan-kelemahan itu seperti yang telah diulas pada subbab pengecekan keabsahan data.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Pedoman Penyulisan Karya ilmiah Universitas Jember (2012:24) menjelaskan, analisis data adalah uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga menjadi suatu informasi dan uraian tentang cara menganalisisnya. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012) menjelaskan, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Analisis Perhitungan Proporsi

Purwanto dan Ratih (2007) menjelaskan, persentase atau proporsi merupakan cara analisis yang paling sederhana yaitu membuat perbandingan kejadian suatu kasus dengan total kasus yang ada dikalikan dengan nilai 100. Rumus dasar yang dipakai adalah:

$$\% = \frac{F \text{ (Frekuensi Suatu Kasus)} \times 100}{N}$$

#### 2. Analisis Time-Series

Hadi (1988) menjelaskan, analisis *time series* adalah suatu analisis terhadap suatu pengamatan, pencatatan, dan penyusunan peristiwa yang diambil dari waktu ke waktu. Pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka-jangka waktu tertentu misalnya tiap akhir triwulan, tiap permulaan tahun, tiap sepuluh tahun dan sebagainya. Sebagai teknik dari statistik, analisis rangkaian waktu baru dapat dilakukan

terhadap data yang sudah diwujudkan dalam angka-angka. Apabila besarnya gejala dalam serangkaian waktu kita beri simbol  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ , dan waktu-waktu pencatatan gejala itu kita beri simbol  $W_1, W_2, \dots, W_n$ , maka rangkaian waktu  $W$  dari gejala  $Y$  akan ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = F(w)$$

Dapat dibaca :  $Y$  adalah fungsi dari  $W$

Dapat diartikan : besarnya gejala  $Y$  tergantung kepada waktu terjadinya gejala itu

### 3.8 Teknik Penyajian Data

Menurut Silalahi (2012:340), penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan sehingga seorang peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks narasi, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data penting untuk dilakukan, karena dengan adanya sebuah data yang tersajikan baik dengan narasi, grafik, gambar, jaringan dan bagan, maka seorang peneliti mempunyai gambaran serta dapat menarik kesimpulan awal hingga kembali ke lapangan. Saat sebuah data baru yang tersajikan, akan mempermudah peneliti untuk memperkuat kesimpulan awal atau bahkan dapat merubah kesimpulan.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan (hasil penelitian) tentang kontribusi sektor pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan berikut.

1. Kontribusi sektor pariwisata (perhotelan, restoran, perdagangan) dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015 dinilai cukup besar. Rata-rata kontribusi sektor pariwisata pertahun mencapai 23,26 persen dengan rata-rata peningkatan kontribusi pertahun sebesar 2,63 persen.
2. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, secara total dari tahun 2011-2015 jumlah tenaga kerja perempuan sektor pariwisata lebih besar dari tenaga kerja laki-laki yakni mencapai 539.350 orang, sedangkan laki-laki mencapai 415.710 orang. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pertahun, pertumbuhan tenaga kerja laki-laki lebih besar dari tenaga kerja perempuan yakni mencapai 10,20 persen, sedangkan perempuan mencapai 5,68 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan serta peluang yang sama untuk bekerja di sektor pariwisata. Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga kerja pariwisata (hotel dan restoran) masih didominasi oleh lulusan SLTA dengan persentase sebesar 82,65 persen. Melihat lebih lanjut, terkait pengkrekrutan pegawai, Lulusan SMK Perhotelan atau sekolah yang *basicnya* perhotelan lebih diutamakan dari lulusan lainnya. Sedangkan ditinjau berdasarkan usia, tenaga kerja pariwisata masih didominasi oleh kategori usia muda (18-30 tahun), dengan persentase sebesar 77,32 persen.

## 5.2 Saran (Rekomendasi)

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten dengan sektor pariwisata yang tergolong maju, hal ini dapat dilihat dari pembangunan pariwisata dalam rentang tahun 2011-2015. Hal ini merupakan momentum yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat Banyuwangi sehingga dapat bekerja disektor pariwisata. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Mendirikan dan menambah sekolah dengan *basic* perhotelan dan restoran.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan pariwisata kepada masyarakat usia muda (18-30 tahun), sehingga masyarakat usia muda dapat diberdayakan dengan sebaik mungkin. Hal ini akan sangat membantu bagi masyarakat usia muda yang sedang mencari pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Afrizal,. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Bina Aksara.
- Faisal, S. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1988. *Statistik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Joyosuharto. 2000. *Aspek Ketersediaan dan Tuntutan Kebutuhan dalam Pariwisata: Dasar-Dasar Manajemen Pariwisata Alam*. Editor: Fandeli. Yogyakarta: Liberty.
- Moeloeng. 2000. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pendit, Ny. S. 1990. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pandnya Paramita.
- Purwanto dan Ratih. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif (Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, A. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rai Utama. I Gusti. 2014. *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Seran, Sirilius. 2016. *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Adiatama.

- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun dan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Spilane, JJ. 1987 *Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Sleman: Deepublish.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press
- Usman, H. dan Akbar, P. S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, R. dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zebua, Manahati. 2016. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi*.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi*

### **Skripsi, Jurnal**

Akuino, Cori. 2013. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 11, No 02: hal 154-165.

Harjanto, T. 2014. *Pengangguran dan Pembangunan Nasional*. Jurnal Ekonomi ISSN 2302-7169. Volume 2, No. 2: hal 67-77.

Kurniawan, Fandy *ed al*. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Study Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, No 1: hal 47-54.

Muhdar. 2015. *Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Jurnal Al-Buhuts ISSN 1907-0977. Volume 11: hal 42-66.

Sosongko, Probo dan Triwijayanti, Dewie. 2013. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan dan Restoran di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 1, No. 3: hal 848-857.

Rizkhi, Chandra. 2015. *Peran Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2010-2014*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Soebagyo. 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. Jurnal Liquidity. Volume 1, No. 2: hal 153-158.

### **Publikasi**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2014*. Banyuwangi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2016*. Banyuwangi.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Keadaan Angkatan Kerja 2015*. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009*. Jakarta

Kementrian Pariwisata. *Passanger Exit Survey 2015*. Jakarta

Kementrian Pariwisata. *Neraca Satelit Pariwisata 2014*. Jakarta

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015*. Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021*. Banyuwangi.

#### **Internet**

situs [www.banyuwangikab.bps.go.id](http://www.banyuwangikab.bps.go.id)

situs [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

situs [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id)

situs [www.banyuwangitourism.com](http://www.banyuwangitourism.com)

<http://www.semangatbanyuwangi.com/2015/04/15-penghargaan-bergengsi-untuk.html> (diakses tanggal 17 desember 2016).



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA 1**

Kepada : Manajer perhotelan dan restoran

1. Berapa jumlah karyawan di hotel/restoran ?
2. Berapa jumlah karyawan laki-laki dan perempuan?
3. Berapa jumlah karyawan yang tamat dengan ijazah SMA/SMP/SD?
4. Berapa jumlah karyawan yang berusia antara umur 18-30 tahun?
5. Berapa jumlah karyawan yang berusia antara umur 30-50 tahun?
6. Lulusan apa yang lebih diutamakan untuk bekerja di perhotelan/restoran?
7. Skil apa saja yang menjadi kebutuhan dari industri hotel/restoran?

### **PEDOMAN WAWANCARA 2**

Kepada : Bapak Darmanto

Jabatan : Bidang pariwisata Disbudpar Kab. Banyuwangi

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memilih pengembangan pariwisata sebagai alternatif atau sebagai tujuan utama pembangunan?
2. Apa korelasinya pembangunan pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemerataan kesempatan kerja?
3. Bagaimana kesiapan dan dukungan masyarakat dalam merespon pembangunan sektor pariwisata?
4. Apakah ada dampak positif pembangunan sektor pariwisata bagi masyarakat yang tidak terkait langsung dengan sektor pariwisata, katakanlah seperti petani, nelayan dan sebagainya? Apa dampak positif tersebut?
5. Apa dampak negatif dari pembangunan sektor pariwisata jika dilihat dari sisi sosial ekonomi?

### **PEDOMAN WAWANCARA 3**

Kepada : Bapak Soni

Jabatan : Kasi pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya  
Serta usaha jasa pariwisata pada bidang produk  
Wisata

1. Apakah pengembangan sumberdaya yang terkait dengan pariwisata, katakanlah sumberdaya fisik maupun manusia dinilai penting? Mengapa?
2. Salah satu tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja 2015 dan 16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah mengembangkan pengusaha objek wisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Menurut bapak apa yang dimaksud berbasis masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata?

3. Melihat sasaran yang tertuang dari Rencana Kerja 2015 dan 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, adalah SDM pariwisata sebagai gerbang pertama dalam memajukan potensi daerah. Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam memajukan potensi daerah?
4. Apakah pengembangan pariwisata dapat menciptakan peluang usaha?
5. Bagaimana masyarakat dapat melihat peluang tersebut?
6. Apakah pengembangan usaha kreatif masyarakat dinilai penting? Mengapa?

## **PEDOMAN WAWANCARA 4**

Kepada : Pelaku usaha kuliner, pangan olahan makanan, souvenir/aksesoris, dan masyarakat sekitar objek wisata

1. Sejak kapan usaha ini berdiri?
2. Berapa Jumlah karyawan yang bekerja di sini?
3. Apakah terjadi peningkatan pendapatan?
4. Apa pekerjaan bapak/i sebelum membuka usaha ini?

**DOKUMENTASI (FOTO)**

Foto dengan beberapa informan



Bersama Bpk. Darmanto



Bersama Bpk. Soni



Bersama Ketua PHRI Bwi



Bersama Produsen Pengolahan Pangan



Bersama Pelaku Usaha Kuliner